



RANHIR RENJA

***KECAMATAN
KOTA BANGUN***

2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN

Jalan : Ki Hajar Dewantara Kota Bangun Telp.(0541) 6668674 Kode Pos 75561
Email : kotabangunkec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN

Nomor : B-307/UMTAPEG/CamatKoba/900.1.2.2/03/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA DAN RENJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN
TAHUN 2026**

CAMAT KOTA BANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Personalia Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kata Pengantar

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun. Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Camat Kota Bangun dalam tahun 2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil pembuatan Rancangan Akhir Renja ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan program / kegiatan yang ada.

Didalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang terbatas, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Kecamatan Kota Bangun.

Akhir nya diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kota Bangun, 14 Agustus 2025
Plt. Camat Kota Bangun

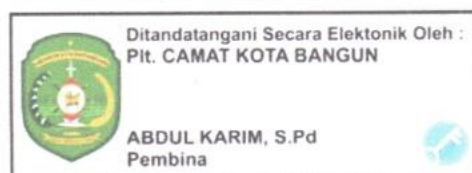
Abdul Karim, S.Pd
NIP. 196911201996031002

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 566/SK BUP/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
2. Berdasarkan RKA dan DPA Belanja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN TENTANG PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENJA DAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan RENJA dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagai terlampir;
- KEDUA : Tim Penyusunan RENJA dan RENJA Perubahan bertugas untuk:
- Menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Renja dan Renja Perubahan;
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - Menyusun draft dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Melaporkan hasil penyusunan kepada Camat Kota Bangun.
- KETIGA : Tim Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Kota Bangun selaku Atasan/Pimpinan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 07 Maret 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN

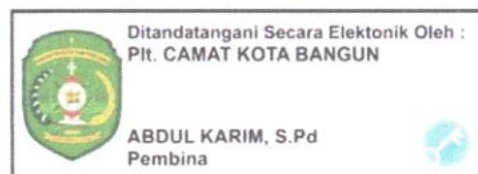
NOMOR : B-307/UMTAPEG/CamatKoba/900.1.2.2/03/2025

TANGGAL : 07 Maret 2025

TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan RENJA dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ABDUL KARIM, S.Pd	PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB	Pit. CAMAT
2	SUPRIADI, S.I.P	KETUA	KASI. PMD
3	MURLIAN, S.A.P	SEKRETARIS	KASUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
4	SURIANSYAH, SE	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
5	Drs. SYAHMINAN	ANGGOTA	KASI PELAYANAN UMUM
6	NURUL ASINAR, S.I.P	ANGGOTA	Pit. KASUBBAG. UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
7	AGUS SOPIAN, S.I.P	ANGGOTA	KASI. KESSOS
8	SYAHRIAL, S.I.P	ANGGOTA	STAF BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 07 Maret 2025



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Pada Tahun 2026	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
4.1. Program dan Kegiatan	48
BAB V PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan Akhir Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan Akhir RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
8. Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi pemutakhir an klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan & keuangan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu Tahun Anggaran dan mempunyai fungsi :

- Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 dalam rencana program prioritas.

- Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kota Bangun dan kegiatan Pembangunan daerah yang menjadi sehingga terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Terwujudnya sinergi program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Menciptakan kepastian program kegiatan dalam perencanaan alokasi sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Ranhir Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II .EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu & Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra PD pada Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kota Bangun adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama :

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun:

$$\frac{\text{Tingkat Capaian Kinerja} \times 100}{\text{Target Kinerja}}$$

2. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kota Bangun:

Survey data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

3. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun

$$\frac{\text{Cakupan Aksesibilitas Yang Dibangun} \times 100}{\text{Jumlah Keseluruhan Target Aksesibilitas}}$$

4. Validasi data yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Daerah di Wilayah Kecamatan Kota Bangun

$$\frac{\text{Jumlah Data Yang Terakomodir} \times 100}{\text{Jumlah Keseluruhan Target Data Dibutuhkan}}$$

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021– 2026

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Organisasi Perangkat Daerah diimplementasikan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun 2025
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Kota Bangun

OPD : KECAMATAN KOTA BANGUN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/Kegi atan Renja SKPD Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
									Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	300	3,00
						Tingkat Aksesibilitas Wlayah Kecamatan	88,1	88,1	88,1	88,1	100	89,1	0	0,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	2	1	2	2	100	2	0	0,00

					Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat								
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1250	0	250	250	100	250	0	0,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80	96	80	80	100	80	0	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	68	65	66,7	66,7	66,7	66,7	0	0,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	180	0	36	30	83	36	0	0,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	750	150	150	140	93	150	0	0,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180	374	376	360	96	376	0	0,00

						Jumlah Lembaga	10	2	4	4	100	4	0	0,00
						Jumlah Linmas Kecamatan	1860	372	372	372	100	372	0	0,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	78	0	75	75	100	75	0	0,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	0	6	6	100	6	0	0,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh	20	0	4	4	100	4	0	0,00

					Tokoh Masyarakat	agama dan tokoh masyarakat								
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65	76	76	76	100	76	0	0,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5	1	5	2	40	5	0	0,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10	0	2	2	100	2	0	0,00
					Fasilitasi MTQ	Jumlah peserta MTQ	200	50	50	50	100	50	0	0,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	0	12	9	75	12	0	0,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja	73	70	72	72	100	72	0	0,00

					DESA	pemerintahan Desa dalam kategori baik								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	105	21	11	11	100	11	0	0,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30	0	6	0	0	6	0	0,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	105	0	11	0	0	11	0	0,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	105	21	11	11	100	11	0	0,00
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	67	67	67	100	67	0	0,00

X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	3	31	10	32	31	0	0,00
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	4	3	3	100	3	0	0,00
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	0	5	0	0	5	0	0,00
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	0	5	0	0	5	0	0,00
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25	0	5	0	0	5	0	0,00
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	25	0	5	0	0	5	0	0,00

						SKPD								
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	4	0	0,00
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	0	4	0	0	4	0	0,00
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75	1	1	1	100	1	0	0,00
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	40	44	44	100	44	24	0,55
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1	2	1	50	2	0	0,00
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan	60	12	12	12	100	12	0	0,00

					Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	2935	575	580	580	100	580	0	0,00
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65	13	12	12	100	12	0	0,00
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	4383	0	877	0	0	877	0	0,00
X	XX	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220	0	5	4	80	5	0	0,00
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	8	8	12	12	100	12	0	0,00
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	1	1	1	100	1	0	0,00
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	15	1	1	1	100	1	0	0,00

						Disediakan								
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	24	24	24	100	24	0	0,00
						<i>Alat Tulis Kantor</i>	120	24	24	24	100	24	0	0,00
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	288.000	56000	56000	56000	100	56000	0	0,00
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu	2330	0	466	0	0	466	0	0,00
						<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2330	0	466	0	0	466	0	0,00
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	150	209	209	200	96	30	0	0,00
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	3100	2947	620	610	98	620	0	0,00
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80	16	16	16	100	16	0	0,00
X	XX	01.	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35	1	7	1	14	7	0	0,00

X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	71	17	17	17	100	17	0	0,00
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	4	1	1	100	1	0	0,00
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	1	0	0	1	0	0,00
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	9860	0	12	0	0	12	0	0,00
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000	12	12	12	100	12	0	0,00
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	840	12	12	12	100	12	3	0,00
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3433	697	684	684	100	684	0	0,00
						<i>Jumlah Tenaga Pendukung non PNS</i>	3420	684	684	684	100	684	15	0,00
						<i>Jumlah Laporan</i>	13	13	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

						<i>Keuangan Daerah</i>								
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	0	100	0	0	100	0	0,00
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	0	1	0	0	1	0	0,00
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	20	4	4	4	100	4	0	0,00

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah bahwa hampir program dan kegiatan mencapai target yang diharapkan.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

- a. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- b. Dengan merealisasikan Sistem E-Planning dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- c. Adanya Perubahan/ Penambahan Nomenkatur Permendagri No 90 Tahun 2019

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Hal Penganggaran untuk lebih cepat di sahkan
- b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga tercipta akuntabilitas kinerja kecamatan serta memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya. Dalam pelaksanaannya, urusan wajib meliputi bidang :

1. Bidang ketenagakerjaan, yaitu pelayanan pemberian kartu pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja.
2. Bidang pekerjaan umum, yaitu pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal.
3. Bidang perhubungan, yaitu pemberian pelayanan terdiri dari :
 - a) Izin usaha angkutan perdesaan dalam wilayah kecamatan untuk perorangan.
 - b) Izin jasa titipan lokasi kecamatan.
 - c) Izin usaha angkutan penyeberangan sungai/ danau dalam wilayah kabupaten.
 - d) Penentuan lokasi parkir.
4. Bidang pertanahan yaitu pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah diwilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/ penguasaan tanah.
5. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah berupa:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b) Angsuran jual beli eks rumah diatas yang terletak diwilayah kecamatan.
 - c) Angsuran jual beli eks kendaraan dinas yang terletak diwilayah kecamatan.

Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan yaitu urusan pilihan meliputi bidang :

1. Pertanian, pemberian pelayanan izin usaha penggilingan padi/tapioca milik warga yang tidak menggunakan modal asing.
2. Perikanan, pemberian pelayanan dasar dalam:

- a. Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam usaha :
 - a) Penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor, bermotor luar, bermotor dalam yang tidak berukuran lebih dari 5 GT (Gross Tonage) dan atau mesinnya yang berkeuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
 - b) Budidaya ikan perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan di air payau tidak lebih dari 4 Ha;
 - c) Pengumpulan dan pengelolaan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian pelayanan meliputi :
 - a. Izin penggalian air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan diameter pipa sampai dengan 2 inci;
 - b. Izin usaha pemanfaatan air bawah tanah perorangan / masyarakat dengan produksi diatas 50 m³/bulan
 - c. Izin usaha pengambilan dan pemanfaatan air untuk perorangan / masyarakat dengan produksi diatas 50 m³/bulan
4. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perorangan yang terdiri dari :
 - a. Izin usaha penginapan dibawah 15 meter;
 - b. Izin usaha rumah makan dan minuman di bawah 25 kursi;
 - c. Izin usaha kolam pemancingan;
 - d. Izin usaha salon kecantikan;
 - e. Izin usaha barber shop (Potong rambut);
 - f. Izin usaha balai pertemuan umum;
 - g. Pemberian izin lapangan tenis;
 - h. Pemberian izin lapangan bulu tangkis tertutup;
 - i. Pemberian izin gelanggang tenis meja;
 - j. Pemberian izin lapangan sepak bola tertutup (futsal);
5. Perindustrian dan perdagangan, pemberian pelayanan atas :

- a. Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang iusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimum Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis industri :
 - a) IK pengeringan / pengasapan ikan
 - b) IK gula merah
 - c) IK tahu dan tempe;
 - d) IK pengesapan karet
 - b. Surat Izin udaha Perdagangan (SIUP) kecil perorangan
6. Peternakan , pemberian pelayanan data :
- a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
 - b. Surat keterangan Asal ternak untuk di sembelih / potong antar kecamatan dalam kabupaten.
 - c. Izin toko / kios dan pengecer obat hewan.

Fungsi Kecamatan Kota Bangun sebagai pusat pelayanan masyarakat yang merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan , Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kota Bangun yang terealisasi dengan target yang telah ditentukan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun :

- a. Cakupan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat;
- c. Rata-rata Kinerja Kecamatan;
- d. Presentase jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
- e. Cakupan Saluran Drainase/Gorong gorong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik
- f. Cakupan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan/Kelurahan
- g. Cakupan Turap/Talud/Bronjong

Tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	6	7	8	9		10	11	13	13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017).	70%	75%	70%	70%	75%	N/A	83,51	70%	70%
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	75%	75%	75%	75%	75%	80%	79,07%	75%	75%
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75%	75%	75%	75%	75%	100%	76,67%	75%	75%
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Meningkatnya pendapatan Asli Desa	69,70%	69,70%	70,00%	70,00%	70,00%	15,7%	15,03%	70,00%	70,00%
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah Kecamatan	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan Kota Bangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 11 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Kota Bangun. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Kota Bangun memiliki potensi potensi yang sangat beragam.

Kecamatan Kota Bangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Kutai kartanegara yang dilaksanakan oleh Camat Kota Bangun selain itu juga tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kota Bangun masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan ,terkait dengan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber Daya Manusia yang belum optimal
4. Kapasitas Kelembagaan Desa yang belum optimal
5. Infrastruktur perdesaan yang masih kurang

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kota Bangun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

- 1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
 - a. Bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan KTP-Elektronik karena terbatasnya bahan cetak;
 - b. Jaringan internet yang terkadang tidak stabil sehingga pada saat warga berurusan Aplikasi tidak dapat terakses
 - c. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengajukan permohonan penambahan kuota pencetakan

KTP Elektronik, dan juga memberikan informasi ke aparat desa apabila terjadi kendala jaringan

2) **Pembinaan Perangkat Desa, Permasalahan:**

- a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Desa serta sarana Prasarana Kantor yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien dan muncul inovasi-inovasi yang baru.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain mengadakan bimtek untuk meningkatkan SDM aparat desa itu sendiri, Pembinaan secara berkesinambungan baik dari tata kelola pemerintahan, produk hukum desa, tata kelola keuangan dan aset desa dan tata kelola kearsipan

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

- 1) Masih terbatasnya pemberian kuota pembuatan sertifikat hak milik tanah pada Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona sehingga dapat memunculkan kecemburuan sosial
- 2) Tata Kelola Aset yang masih belum optimal Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melakukan inventaris kepada masyarakat yang tidak dapat porsi pembuatan SHM dan kita berikan pengertian agar tidak muncul kecemburuan yang mengarah konflik. Dan Pembinaan secara berkesinambungan untuk tata kelola Aset desa agar tertib

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan, Permasalahan:

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah, upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat Kelurahan maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Permasalahan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurangnya pelatihan pelatihan dari instansi maupun lembaga yang dapat meningkatkan keterampilan para generasi muda yang di masing-masing wilayah.
- 3) Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 3) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu juga dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun, dengan pertimbangan atas kajian terhadap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan kecamatan Kota Bangun juga berupaya dengan :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dimaksudkan adalah untuk:
Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang professional, berdedikasi tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang aspiratif, partisipatif, akuntabel melalui :

- Melaksanakan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.
 - Melaksanakan tugas pembangunan di segala aspek yang di landasi rasa adil dan merata.
 - Memberikan Pelayanan yang terbaik
 - Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM
2. Memberdayakan potensi daerah berbasis sumber daya lokal adalah:
- Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang efektif efisien dengan sasaran terpeliharanya aset daerah secara optimal. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan tujuan sasaran yang ingin dicapai;
 - Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan (disparitas) antar wilayah;
 - Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan;
3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dengan semangat dari dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah:
- Memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsep pembangunan adalah milik semua masyarakat, bahkan sebatas kemauan dan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus di berikan ruang kepada lembaga kemasyarakatan yang ada, agar keberadaan lembaga yang ada ini bersama pemerintah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki.
4. Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris dan perikanan dengan konsekuensi dari daerah agraris dan perikanan adalah:
- Pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dapat dimaksimalkan maka produk-produk yang ada di daerah tidak boleh lagi dijual dalam bentuk bahan mentah akan tetapi harus diproses , untuk itu kedepan masuknya industrialisasi

ke Kota Bangun harus dapat memperkuat sektor agraris dan perikanan dengan memberdayakan potensi lokal yang tersedia sangat cukup di wilayah ini.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Pada Tahun 2026

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Rancangan Akhir prioritas pembangunan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada Tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Review rancangan Akhir RKPD Kecamatan Kota Bangun adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan Akhir dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
									KECAMATAN					KECAMATAN					
		7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Bangun	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	444,773,837	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Bangun	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	1,470,978,000	
										Kota Bangun	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	88.10 Persen			Kota Bangun	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	88.10 Persen	12,000,000,000	
		7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 kegiatan	270,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 kegiatan	350,000,000	
		7	01	02	2.01	01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	120,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	150,000,000	
		7	01	02	2.01	02	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	200,000,000	
		7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	30,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	75,000,000	
		7	01	02	2.02	02	01		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen	-	

Tujuan	Sasaran	Kode						N o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	02	2.02	02	02		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	
		7	01	02	2.02	02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	75,000,000	
		7	01	02	2.03				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0 Kali	-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0 Kali	-	
		7	01	02	2.03	01	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	-	
		7	01	02	2.03	02	02		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kota Bangun	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Unit	-	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kota Bangun	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Unit	-	
		7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	144,773,837	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	13,053,978,000	
		7	01	02	2.04	01	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	-	
		7	01	02	2.04	02	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	20,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	1,045,978,000	
		7	01	02	2.04	03	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	124,773,837	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	12,008,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Bangun	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	75 Persen	440,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Bangun	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	75 Persen	436,000,000	
		7	01	03	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	80,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	100,000,000	
		7	01	03	2.01	01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	50,000,000	
		7	01	03	2.01	02	02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	-	
		7	01	03	2.01	03	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50,000,000	
		7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	
		7	01	03	2.02	01	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Orang	-	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Orang	-	
		7	01	03	2.02	02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun	0 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun	0 Unit	-	
		7	01	03	2.02	03	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan	0 Orang	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan	0 Orang	-	
		7	01	03	2.02	04	04		Evaluasi Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti Lomba	0 Desa / Kelurahan	-	Evaluasi Kelurahan	Kota Bangun	Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti Lomba	0 Desa / Kelurahan	-	
		7	01	03	2.03				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	360,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	336,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN						
		7	01	03	2.03	01	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	360,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	336,000,000		
		7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Bangun	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	75 persen	100,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Bangun	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	75 persen	175,000,000		
		7	01	04	2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bangun	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	100,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bangun	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	175,000,000		
		7	01	04	2.01	01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0 Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan	50,000,000		
		7	01	04	2.01	02	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	100,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125,000,000		
		7	01	04	2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bangun	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	0 Kegiatan	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bangun	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	0 Kegiatan	-		
		7	01	04	2.02	01	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	-		

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Perling
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Bangun	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55 Persen	20,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Bangun	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55 Persen	195,000,000	
		7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0 Kegiatan	20,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0 Kegiatan	195,000,000	
		7	01	05	2.01	04	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	10,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	180,000,000	
		7	01	05	2.01	05	05		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	-	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	-	
		7	01	05	2.01	06	06		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0 Lembaga Masyarakat	-	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0 Lembaga Masyarakat	-	
		7	01	05	2.01	07	07		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen	-	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen	-	
		7	01	05	2.01	08	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	15,000,000	
		7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kota Bangun	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	71.42 Persen	20,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kota Bangun	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	71.42 Persen	80,000,000	
		7	01	06	2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	20,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	80,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	06	2.01	01	01		Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	02	02		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	03	03		Facilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	20,000,000	Facilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	5,000,000	
		7	01	06	2.01	04	04		Facilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	-	Facilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	-	
		7	01	06	2.01	05	05		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	06	06		Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	07	07		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	08	08		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	-	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	09	09		Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	-	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	10	10		Facilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	-	Facilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	11	11		Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	-	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	-	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	06	2.01	12	2		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	13	3		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	14	4		Fasilitasi Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	15	5		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	16	6		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	-	
		7	01	06	2.01	17	7		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	75,000,000	
		7	01	06	2.01	18	8		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	
		7	01	01.					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	8,966,894,127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	6,402,333,653	
		7	01	01.	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	240,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	325,000,000	
		7	01	01.	2.01	01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01.	2.01	02	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.01	03	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.01	04	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.01	05	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.01	06	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30,000,000	
		7	01	01.	2.01	07	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5,000,000	
		7	01	01.	2.01	09	09		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Bangun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Laporan	150,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Bangun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Laporan	250,000,000	
		7	01	01.	2.01	10	10		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan		
		7	01	01.	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan	4,626,536,520	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan	4,626,041,725	

Tujuan	Sasaran	Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
								Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01.	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.441.536,528	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	4.436.041,725	
		7	01	01.	2.02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.02	03	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.02	04	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.02	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	
		7	01	01.	2.02	06	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	80,000,000	
		7	01	01.	2.02	08	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	675 unit	222,278,712	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	675 unit	102,278,712	
		7	01	01.	2.03	01	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
		7	01	01.	2.03	02	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 Dokumen	150,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 Dokumen	50,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
		UNSUR KEWILAYAHAN												UNSUR KEWILAYAHAN							
		7	01	01.	2.03	03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	-	
		7	01	01.	2.03	04	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	
		7	01	01.	2.03	05	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	47,278,712	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	47,278,712	
		7	01	01.	2.03	06	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	
		7	01	01.	2.03	07	07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	-	
		7	01	01.	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	40	orang	132,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	40	orang	-	
		7	01	01.	2.05	01	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bangun	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bangun	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	
		7	01	01.	2.05	02	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30	Paket	32,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30	Paket	-	
		7	01	01.	2.05	03	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	
		7	01	01.	2.05	04	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	-	
		7	01	01.	2.05	05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	-	
		7	01	01.	2.05	06	06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	Orang	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	Orang	-	
		7	01	01.	2.05	07	07		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	Laporan	-	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	Laporan	-	

Tujuan	Sasaran	Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
								Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
								UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01.	2.05	08	08	Pemindahan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	-	Pemindahan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	-	
		7	01	01.	2.05	09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	
		7	01	01.	2.05	10	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
		7	01	01.	2.05	11	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
		7	01	01.	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	720,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	197,474,160	
		7	01	01.	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	
		7	01	01.	2.06	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	700,000	
		7	01	01.	2.06	03	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	200,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	-	
		7	01	01.	2.06	04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	
		7	01	01.	2.06	05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13,774,160	
		7	01	01.	2.06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
		7	01	01.	2.06	07	07	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	-	
		7	01	01.	2.06	08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,000,000	
		7	01	01.	2.06	09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01	2 0 6	1 0 0	1 0 0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	20,000,000	
		7	01	01	2 0 6	1 1 1	1 1 1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	
		7	01	01	2 0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	18 unit	1,785,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	18 unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 1 1	0 1 1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 2 2	0 2 2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 3 3	0 3 3		Pengadaan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	715,000,000	Pengadaan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 4 4	0 4 4		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 5 5	0 5 5		Pengadaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 6 6	0 6 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 7 7	0 7 7		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 8 8	0 8 8		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Bangun	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Bangun	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	0 9 9	0 9 9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	400,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
		7	01	01	2 0 7	1 0 0	1 0 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	

Tujuan	Sasaran	Kode					N o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Pendang
								Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01	2 0 7	1 1	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	962,420,722	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1,027,788,966	
		7	01	01	2 0 8	0 1	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
		7	01	01	2 0 8	0 2	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	604,729,358	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	671,097,592	
		7	01	01	2 0 8	0 3	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	
		7	01	01	2 0 8	0 4	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	354,691,364	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	354,691,364	
		7	01	01	2 0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	609 unit	338,558,165	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bangun	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	609 unit	223,760,000	
		7	01	01	2 0 9	0 1	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	51,250,000	
		7	01	01	2 0 9	0 2	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	173,658,165	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100,000,000	
		7	01	01	2 0 9	0 3	0 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	
		7	01	01	2 0 9	0 4	0 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	

Tujuan	Sasaran	Kode						No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
									Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
									UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
		7	01	01.	2 0 9	0 5	0 5		Pemeliharaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	
		7	01	01.	2 0 6	0 6	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2,500,000	
		7	01	01.	2 0 9	0 7	0 7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	
		7	01	01.	2 0 9	0 8	0 8		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Bangun	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Bangun	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	
		7	01	01.	2 0 9	0 9	0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	70,000,000	
													9,991,697,964					26,767,311,553	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang diikuti oleh perwakilan 11 desa berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pemangku Desa dengan membawa hasil musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

Dalam hal pencapaian program pembangunan tersebut Peran Pemerintahan Desa, kecamatan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki andil yang besar selain itu juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan sangat diharapkan dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility(CSR).

Dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus pada pembangunan yang sinkron dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan fokus pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang dapat mempercepat laju pembangunan antara lain :

Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan telah terinput pada SIPD adalah sebagai berikut :



DAFTAR HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN KOTA BANGUN 2026 OPD TUJUAN KECAMATAN

NO	PENGUSUL	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN	PRIORITAS	ANGGARAN Rp.	CATATAN OPD
Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Kota Bangun)						1.000.000.000	
1	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2025378 belum ada lanjutan pembuangan drainase lingkungan di jalan sri bangun rt.019 (buntu)	Jl. Sri Bangun RT.019 Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Normalisasi Saluran Draniase karena saat hujan air tumpah ke jalan dan lengkapi dokumen pendukung usulan	1	200.000.000	Prioritas

2	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2108984 perlu nya di normalisasi saluran pembuangan di Desa Kota Bangun Ulu	Jalan H.M. Aini RT. 014, 015 dan 016 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Tidak diperlukan) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Normalisasi Saluran Draniase karena saat hujan air tumpah ke jalan dan lengkapi dokumen pendukung usulan	2	200.000.000	dikembalikan
3	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2216053 tersumbat nya saluran limbah rumah tangga di wilayah tersebut, maka perlu di lakukan normalisasi saluran pembuangan RT. 006 Dusun Kenanga Desa Kota Bangun Ulu	Jl. Mulawarman II Gang al falah RT. 006 Dusun Kenanga Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkap) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Perlunya Normalisasi Saluran saluran pembuang karena saat hujan air menggenang dan lengkapi dokumen pendukung usulan	3	200.000.000	dikembalikan
4	Rodiani Liang	ID SIPD: 2350446 penuh di tumbuh oleh eceng gondok dan sejenisnya	Desa Liang RT.008 s.d RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: untuk memperlancar pembuangan air	4	200.000.000	Prioritas
5	Rodiani Liang	ID SIPD: 2350633 penuh di tumbuh oleh eceng gondok dan sejenisnya	Desa Liang RT. 001 s/d RT .011, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: untuk memperlancar	5	200.000.000	Prioritas

				saluran pembuang			
Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan (Kota Bangun)						600.000.000	
1	Yusuf Kota Bangun Seberang	ID SIPD: 2013529 WARGA BELUM MEMILIKI MCK	JL.PATEH KOTA RT.014, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan MCK untuk menjaga kebersihan dan kesehatan warga serta lengkapi dokumen pendukung usulan	1	200.000.000	Prioritas
2	Sopyan Noor Pela	ID SIPD: 2081452 MCK yang ada mungkin tidak terawat dengan baik, kotor, atau rusak. Hal ini bisa mengarah pada masalah sanitasi dan kesehatan, seperti penyebaran penyakit akibat kurangnya kebersihan Dan Jika sistem pembuangan limbah tidak memadai atau tidak ada, limbah dapat mencemari lingkungan sekitar, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.	Jalan Jembatan Ulin Poros Pela, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: perlunya pembangunan MCK untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta lengkapi dokumen pendukung usulan kegiatan	2	200.000.000	dikembalikan

3	Sauqani Sebelimbingan	ID SIPD: 2380901 Lanjutan Pembangunan Sanitasi MCK	Jalan Mulawarman RT.01 - RT.05 Desa Sebelimbingan, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: perlu pembangunan Sanitasi MCK untuk kesehatan warga	3	200.000.000	dikembalikan
Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Kota Bangun)						200.000.000	
1	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230213 Penampungan air belum memadai	RT 001 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Sangat diperlukan pemasangan pipanisasi karena kurangnya penampung air bersih dan lengkapi dokumen pendukung usulan kegiatan	1	200.000.000	Prioritas
Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Desa/Kelurahan (Kota Bangun)						200.000.000	
1	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2373873 Demi kelancaran pengamanan desa maka perlu pembangunan Pos Keamanan di setiap RT Desa Liang Ulu	RT. 01 s/d RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Demi kelancaran pengamanan desa maka perlu pembangunan Pos Keamanan di setiap RT Desa Liang Ulu	1	200.000.000	Prioritas
Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Kota Bangun)						1.000.000.000	

1	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2212699 tidak adanya saluran pembuangan limbah masyarakat di perbatasan desa sehingga sering adanya genangan air di lokasi tersebut RT. 001 Dusun Cempaka Desa Kota Bangun Ulu	Jl. Mulawarman I RT. 001 Dusun Cempaka Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan saluran gorong - gorong sangat diperlukan dan lengkapi dokumen pendukung usulan	1	200.000.000	Prioritas
2	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2310091 Terjadinya penyumbatan saluran pertanian dengan saluran parit kawasan permukiman Desa Liang Ulu.	Jl. P. Suta Kanan RT. 07 Dusun Teratai, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan saluran sangat dibutuhkan agar tidak terjadi genangan air saat hujan	2	200.000.000	Prioritas
3	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2173736 Pembangunan Gorong-gorong beton jalan gotong royong RT. 019 Dusun Melati Desa Kota Bangun Ulu	RT. 019 Dusun Melati Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Karena diwilayah yang dusulkan belum ada gorong - gorong dan lengkapi dokumen pendukung usulan	3	200.000.000	Prioritas

4	Mulyadi, S. Sos Liang Ulu	ID SIPD: 2310060 Desa Liang Ulu dulunya mepunyai saluran yang menghubungkan sungai Mahakam dengan saluran pertanian dan saluran parit, sekarang saluran tersebut dangkal sehingga terjadi penyumbatan saluran pertanian dan saluran parit kawasan permukiman.	Jl. Awang Long RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: terjadi pendangkalan parit / saluran pembuang menuju sungai mahakam	4	200.000.000	Prioritas
5	Yusuf Kota Bangun Seberang	ID SIPD: 2370994 banyak papan jembatan yang patah sehingga jembatan berlubang	jl.Awang Long Rt.01, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: jl.Awang Long Rt.01 banyak papan jembatan yang patah sehingga jembatan berlubang	5	200.000.000	Prioritas
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Kota Bangun)						1.000.000.000	
1	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2150674 terjadinya lonsor perlu adanya penurapan saluran irigasi RT 11	RT 11 KOTA BANGUN ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan Turap untuk menghindari terkikisnya pinggiran saluran dan lengkapi dokumen pendukung usulan	1	200.000.000	Prioritas

2	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2175404 Pembangunan Turap Mata Sapi Jl. H.M Aini H RT. 016 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu	Jl. H.M Aini H RT. 016 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan Turap mata sapi sangat dibutuhkan karena sering terjadi penuruan jalan dan lengkai dokumen pendukung usulan	2	200.000.000	Prioritas
3	Sopyan Noor Pela	ID SIPD: 2180825 Permasalahan abrasi di pinggir Sungai Pela atau sungai yang melintasi desa-desa yang berada di dataran rendah dan rawa-rawa bisa menjadi ancaman besar terhadap kelangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Abrasi, yang terjadi ketika tanah di sekitar sungai terkikis oleh arus air, dapat merusak ekosistem dan mengancam pemukiman serta lahan pertanian. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di pinggir Sungai Pela antara lain:	Jalan, Jembatan Ulin Poros Pela Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan Turap untuk mengurangi abrasi di pinggir Sungai Pela dan lengkai dokumen pendukung usulan	3	200.000.000	Prioritas

4	Suhaimi Sangkuliman	ID SIPD: 2024762 Sebagian Tanah di Pinggir Sungai Sangkuliman Terkikis Akibat Abrasi	Desa Sangkuliman RT 1 - RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana sangat dibutuhkan karena Tanah di Pinggir Sungai Sangkuliman Terkikis Akibat Abrasi dan lengkapi dokumen pendukung usulan	4	200.000.000	Prioritas
5	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2414436 turap ulin sudah rusak pasca kebakaran	Jl. Mulawarman I, RT.006 Dusun Cempaka Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: turap ulin sudah rusak pasca kebakaran	5	200.000.000	Prioritas
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Kota Bangun)						2.800.000.000	
1	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230415 Pembangunan jalan belum selesai	RT 003 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	1	200.000.000	Prioritas

2	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2186140 Akses Jalan Rusak, tidak bisa dilewati Jalan Awang Long RT 14 (batas Desa Kota Bangun Ilir dan Liang Ulu	Desa Kota Bangun Ilir Jalan awng Long RT 14, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih konstruksi tanah dan lengkapi dokumen pendukung usulan	2	200.000.000	Prioritas
3	Junaidy Kedang Murung	ID SIPD: 2176150 perlunya semenisasi jalan poros menuju kota bangun 1	JL.Rancang Rimba Ayu RT.010, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih konstruksi tanah dan lengkapi dokumen pendukung usulan	3	200.000.000	Prioritas
4	Khairul Umam, S. Pd Kota Bangun Ulu	ID SIPD: 2362802 Jalan rusak dan berlubang	Jl. Sri Bangun RT.08 Gang Rambutan Desa Kota Bangun Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: jalan berlubang	4	200.000.000	Prioritas
5	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2229978 Jalan rusak	Gn. Koncong RT 001 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih konstruksi tanah	5	200.000.000	Prioritas

6	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2232675 Pembangunan jalan belum selesai	Gang Jawa RT 011 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	6	200.000.000	Prioritas
7	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230495 Jalan rusak	RT 006 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	7	200.000.000	Prioritas
8	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230525 Pembangunan jalan belum selesai	Jalan Poros Trans Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	8	200.000.000	Prioritas
9	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230566 Pembangunan jalan belum selesai	Dusun Margomulyo Desa Loleng , Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	9	200.000.000	Prioritas

10	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230612 Jalan rusak	Jalan antar kuburan Dusun Sidomulyo- Margomulyo RT 005 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	10	200.000.000	Prioritas
11	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230632 Belum ada jalan	Dusun Margomulyo Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	11	200.000.000	Prioritas
12	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2230661 Jalan rusak	Pinang Kadep RT 002 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	12	200.000.000	Prioritas
13	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2232566 Pembangunan jalan belum selesai	RT. 009 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeli haraan Jalan lingkungan sangat diperlukan karena masih kontruksi tanah	13	200.000.000	Prioritas

14	Rafii,S.Sos Loleng	ID SIPD: 2372235 jalan rusak dan berlubang	jl.Urugan RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: jl.Urugan RT.01 rusak dan berlubang	14	200.000.000	Prioritas
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Kota Bangun)						2.000.000.000	
1	Junaidy Kedang Murung	ID SIPD: 2185357 perlunya lanjutan semenisasi jembatan ulin sungai gelumbang	JL.H.M BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: perlunya lanjutan semenisasi jembatan ulin sungai gelumbang	1	200.000.000	Prioritas
2	Junaidy Kedang Murung	ID SIPD: 2211580 PERLUNYA SEMENISASI JEMBATAN ULIN DI DESA KEDANG MURUNG	JL.H.M BAKRIE RT.001/004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: PERLUNYA SEMENISASI JEMBATAN ULIN DI DESA KEDANG MURUNG RT.001/004 DAN LENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG USULAN	2	200.000.000	Prioritas
3	Supardi, SE Kota Bangun Iilir	ID SIPD: 2314915 jalan jembatan rusak parah butuh semenisasi	jalan hasbullah hasyari rt.007 Gang Harpan Tani Desa Kota Bangun Iilir, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada (Segera dilengkapi) Foto: Tidak ada (Segera dilengkapi) Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: jalan jembatan perlu di semenisasi untuk menjaga kerusakan dan lengkapi	3	200.000.000	Prioritas

				dokumen pendukung usulan			
4	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2152925 Terdengar suara bising perlu adanya peningkatan /Semenisasi Jl Jembatan Gang Baiturrrahman	RT 03 GANG BAITURRAHMAN, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Gang Baiturrrahman	4	200.000.000	Prioritas
5	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2229751 Gang karya etam rusak dan sebagian Jembatam belum selesai perlu adaya lanjutan pembangunan dan rahab	Desa Kota Bangun iilir rt 11, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Gang karya etam rusak dan sebagian Jembatam belum selesai perlu adaya lanjutan pembangunan dan rahab dan lengkapai dokumen pendukung usulan	5	200.000.000	Prioritas
6	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 2152645 Tergengar suara bising.Perlu lanjutan semenisasi gang Pampang	RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan RT.13 perlu disemenisasi	6	200.000.000	Prioritas

7	Junaidy Kedang Murung	ID SIPD: 2211646 PERLUNYA LANJUTAN SEMENISASI JEMBATAN ULIN DEPAN TK DESA KEDANG MURUNG	JL.H.M BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada (Segera dilengkapi) Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: PERLUNYA LANJUTAN SEMENISASI JEMBATAN ULIN RT.004 DESA KEDANG MURUNG DAN LENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG USULAN	7	200.000.000	Prioritas
8	Supardi, SE Kota Bangun Ilir	ID SIPD: 1998694 Terdengar suara bising ,perlu adanya rehab/semenisasi Jembatan Gang H SUKUR	RT 11 GANG H SUKUR, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: perlu adanya rehab/semenisasi Jembatan Gang H SUKUR	8	200.000.000	Prioritas
9	Rodiani Liang	ID SIPD: 2366826 Jalan tersebut menjadi akses utama untuk menghindari jalan rusak,karena itu harus di perlebar dari 2 meter menjadi 3 meter	Jl. Panglima Suta Kanan RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Ada Foto: Ada Koordinat: Tidak ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: Jalan tersebut menjadi akses utama untuk menghindari jalan rusak,karena itu harus di perlebar dari 2 meter menjadi 3 meter	9	200.000.000	Prioritas

10	Junaidy Kedang Murung	ID SIPD: 2374745 PERMOHONAN PENINGKATAN JEMBATAN ULIN LINGKUNGSN DESA KEDANG MURUNG	JL.H.M BAKRIE RT.001-004 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Proposal: Tidak ada Foto: Ada Koordinat: Ada Sumberdana: APBD Kabupaten Keterangan: karena papan jembatan banyak yang patah dan bising	10	200.000.000	Prioritas
----	-----------------------------	---	--	--	----	-------------	-----------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dilakukan sehingga perlu Dokumen Perencanaan yang disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sehingga terwujudnya penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

- Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.
- Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sasaran

- Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatnya Interkoneksi antar wilayah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat dengan menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang lebih prioritas untuk dilaksanakan terutama permasalahan Bidang Ekonomi, bidang Sosial Budaya, bidang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dari 11 desa di kecamatan Kota Bangun Adapun secara detail Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 kecamatan Kota Bangun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kota Bangun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UNSUR KEWILAYAHAN								
					KECAMATAN								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kota Bangun	100 Persen	1,470,978,000	APBD		100 Persen	1,470,978,000
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Kota Bangun	88.10 Persen	12,008,000,000	APBD		88.095 Persen	12,008,000,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kota Bangun	2 kegiatan	350,000,000	APBD		2 kegiatan	350,000,000

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	5	Laporan	150,000,000	APBD		5	Laporan	150,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	5	Dokumen	200,000,000	APBD		5	Dokumen	200,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Kota Bangun	1	SPM	75,000,000	APBD		1	SPM	75,000,000
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	2	Laporan	75,000,000	APBD		2	Laporan	75,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kota Bangun	2	Kegiatan	13,053,978,000	APBD		2	Kegiatan	13,053,978,000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Bangun	0	Dokumen	-	APBD		0	Dokumen	-
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bangun	4	Laporan	1,045,978,000	APBD		4	Laporan	1,045,978,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	80	Laporan	12,008,000,000	APBD		80	Laporan	12,008,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Kota Bangun	75	Persen	436,000,000	APBD		75	Persen	436,000,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kota Bangun	2	Kegiatan	100,000,000	APBD		2	Kegiatan	100,000,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	7	Lembaga Kemasya rakatan	50,000,000	APBD		7	Lembag a Kemasya arakatan	50,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	2	Laporan	50,000,000	APBD		2	Laporan	50,000,000
7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	4	Kegiatan	336,000,000	APBD		4	Kegiatan	336,000,000
7	01	03	2	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Bangun	4	Lembaga Kemasya rakatan	336,000,000	APBD		4	Lembag a Kemasya arakatan	336,000,000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kota Bangun	75	persen	175,000,000	APBD		75	persen	175,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bangun	2	Kegiatan	175,000,000	APBD		2	Kegiatan	175,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	1	Laporan	50,000,000	APBD		1	Laporan	50,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	2	Laporan	125,000,000	APBD		2	Laporan	125,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Bangun	55	Persen	195,000,000	APBD		55	Persen	195,000,000

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kota Bangun	0 Kegiatan	195,000,000	APBD		0 Kegiatan	195,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun	50 Orang	180,000,000	APBD		50 Orang	180,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	2 Dokumen	15,000,000	APBD		2 Dokumen	15,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kota Bangun	71.42 Persen	80,000,000	APBD		71.42 Persen	80,000,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kota Bangun	11 Desa	80,000,000	APBD		11 Desa	80,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Bangun	11 Dokumen	5,000,000	APBD		11 Dokumen	5,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kota Bangun	2 Laporan	75,000,000	APBD		2 Laporan	75,000,000

7	01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bangun	67	Nilai	6,402,333,553	APBD		67	Nilai	7,279,667,932
7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	11	dokumen	325,000,000	APBD		11	dokume n	335,000,000
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	2	Dokumen	40,000,000	APBD		2	Dokume n	40,000,000
7	01	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bangun	4	Dokumen	-	APBD		4	Dokume n	5,000,000
7	01	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Bangun	4	Dokumen	-	APBD		4	Dokume n	5,000,000
7	01	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Bangun	0	Dokumen	-	APBD		0	Dokume n	-
7	01	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	0	Dokumen	-	APBD		0	Dokume n	-

7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	4	Laporan	30,000,000	APBD		4	Laporan	30,000,000
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	2	Laporan	5,000,000	APBD		2	Laporan	5,000,000
7	01	01.	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bangun	200	Laporan	250,000,000	APBD		200	Laporan	250,000,000
7	01	01.	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	1	Laporan		APBD		1	Laporan	
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kota Bangun	15	laporan	4,526,041,725	APBD		15	laporan	5,027,850,264
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	54	Orang/bulan	4,436,041,725	APBD		54	Orang/bulan	4,937,850,264

7	01	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	1	Laporan	10,000,000	APBD	1	Laporan	10,000,000
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bangun	12	Laporan	80,000,000	APBD	12	Laporan	80,000,000
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kota Bangun	575	unit	102,278,712	APBD	575	unit	102,278,712
7	01	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1	Dokumen	5,000,000	APBD	1	Dokumen	5,000,000
7	01	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	25	Dokumen	50,000,000	APBD	25	Dokumen	50,000,000
7	01	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1	Laporan	-	APBD	1	Laporan	-
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	12	Laporan	47,278,712	APBD	12	Laporan	47,278,712

7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bangun	40 orang	-	APBD		40 orang	100,000,000
7	01	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bangun	30 Paket	-	APBD		30 Paket	-
7	01	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bangun	4 Orang	-	APBD		4 Orang	100,000,000
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bangun	8 jenis	197,474,160	APBD		8 jenis	463,000,000
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	1 Paket	3,000,000	APBD		1 Paket	3,000,000
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	3 Paket	700,000	APBD		3 Paket	50,000,000
7	01	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bangun	3 Paket	-	APBD		3 Paket	-
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	1 Paket	75,000,000	APBD		1 Paket	75,000,000
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bangun	2 Paket	13,774,160	APBD		2 Paket	25,000,000
7	01	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	12 Laporan	10,000,000	APBD		12 Laporan	10,000,000

7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	12	Laporan	75,000,000	APBD	12	Laporan	250,000,000
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	100	Dokumen	20,000,000	APBD	100	Dokumen	50,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Kota Bangun	18	unit	-	APBD	18	unit	-
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bangun	0	Unit	-	APBD	0	Unit	-
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bangun	1	Unit	-	APBD	1	Unit	-
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun	2	Unit	-	APBD	2	Unit	-
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun	1	Unit	-	APBD	1	Unit	-
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun	0	Unit	-	APBD	0	Unit	-

7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Bangun	12 bulan	1,027,788,956	APBD		12 bulan	1,027,788,956
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	1 Laporan	2,000,000	APBD		1 Laporan	2,000,000
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bangun	12 Laporan	671,097,592	APBD		12 Laporan	671,097,592
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	12 Laporan	354,691,364	APBD		12 Laporan	354,691,364
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kota Bangun	509 unit	223,750,000	APBD		509 unit	223,750,000
7	01	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bangun	2 Unit	51,250,000	APBD		2 Unit	51,250,000
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bangun	3 Unit	100,000,000	APBD		3 Unit	100,000,000
7	01	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bangun	3 Unit	2,500,000	APBD		3 Unit	2,500,000

7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bangun	5	Unit	70,000,000	APBD	5	Unit	70,000,000
---	----	-----	------	----	--	--	-------------	---	------	------------	------	---	------	------------

20,767,311,553

21,644,645,932

BAB V

PENUTUP

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun. Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Camat Kota Bangun dalam Tahun 2026, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pembuatan Rancangan Akhir Renja yang memberikan informasi tentang pelaksanaan urusan Desentralisasi dan pelaksanaan tugas pemerintah secara umum. Penilaian terhadap pelaksanaan beberapa urusan tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap capaian indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pembuatan Rancangan Akhir Renja ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan program / kegiatan yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang handal, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Tindak Lanjut Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan

dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 ditetapkan 6 Program, 11 Kegiatan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2026. Termasuk di dalamnya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kecamatan meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase yang tersebar pada 11 Desa.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu di tindak lanjuti sebagaimana program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kota Bangun diantaranya permasalahan pengembangan wisata dan pertanian.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati terpilih.

Kota Bangun, 14 Agustus 2025
Plt. Camat Kota Bangun

Abdul Karim, S.Pd
NIP. 196911201996031002